



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2020-2021 |
| Masa Persidangan | : I |
| Rapat Ke- | : 8 |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Rabu, 2 September 2020 |
| Waktu | : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KKIII) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta |
| Acara | : Pembahasan RKA.K/L berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN TA 2021 |
| Ketua Rapat | : Saan Mustopa, M.Si./Wakil Ketua Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI |
| Hadir | : A. 35 (enam belas) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri C. Sekretaris BNPP D. Sekretaris DKPP |

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, BNPP RI, dan DKPP RI, dengan agenda pembahasan RKA.K/L berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN TA 2021, hari Rabu, 2 September 2020, dibuka pukul 10.10 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, M.Si., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, BNPP RI, dan DKPP RI membahas terkait pembahasan RKA.K/L berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN TA 2021. Draf ini merupakan draf akhir, yaitu:

1. Sekjen Kemendagri menyampaikan jumlah pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021 sebesar **Rp3.204.700.438.000,- (tiga trilyun dua ratus empat milyar tujuh ratus juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar **Rp17.303.307.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah)**.
2. Sekjen Kemendagri menyampaikan usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Dalam Negeri sebesar **Rp1.275.386.488.000,- (satu trilyun dua ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)**, termasuk usulan tambahan anggaran DKPP sebesar **Rp91.949.051.000,- (sembilan puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah)**.
3. Sekretaris BNPP menyampaikan tahun 2021 sebesar **Rp227.704.562.000,- (dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)**.

III. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI menyetujui jumlah pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021 sebesar **Rp3.204.700.438.000,- (tiga trilyun dua ratus empat milyar tujuh ratus juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar **Rp17.303.307.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah)**. Namun untuk pengalokasian anggaran program dan kegiatan, Komisi II DPR RI meminta Kemendagri dan DKPP melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali dan untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya.
2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Dalam Negeri sebesar **Rp1.275.386.488.000,- (satu trilyun dua ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)**, termasuk usulan tambahan anggaran DKPP sebesar **Rp91.949.051.000,- (sembilan puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu rupiah)**, dan mengamanatkan kepada anggota Banggar di Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

3. Komisi II DPR RI menyetujui jumlah pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2021 sebesar **Rp227.704.562.000,- (dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)**, Namun untuk pengalokasian anggaran program dan kegiatan, Komisi II DPR RI meminta BNPP melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali dan untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

Jakarta, 2 September 2020
KETUA RAPAT



SAAN MUSTOPA, M.Si.

A-367